



2025 RENJA SETDA

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





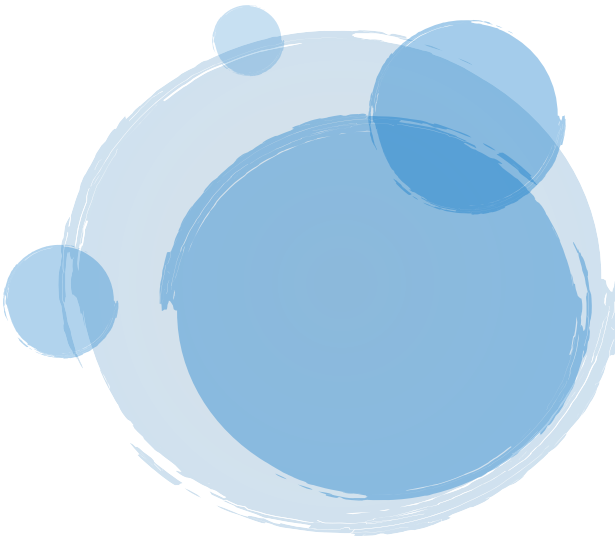
BAB I

PENDAHULUAN

BERISI TENTANG LATAR BELAKANG, DASAR ATURAN DAN DESKRIPSI DARI PROSES PERENCANAAN



Kantor Gubernur
Gorontalo
Kel Botu



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-PD. Renja-PD merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan memuat capaian pelaksanaan tugas perangkat daerah tahun sebelumnya, dan memuat rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang penyusunannya berjalan secara simultan.

Renja-PD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 dan penjabatan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026. RPD digunakan sebagai acuan pembangunan mengingat setelah Tahun 2023 Provinsi Gorontalo tidak mempunyai Kepala Daerah terpilih melalui mekanisme pemilihan Kepala Daerah dikarenakan menunggu waktu Pilkada Serentak Tahun 2025 sehingga dalam dokumen perencanaan perangkat daerah tidak menelaah visi dan misi kepala daerah serta jangka waktu pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang hanya dilaksanakan selama 4 tahun.

Renja-PD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini kemudian memuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam pembahasan dan penentuan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Penyusunan Renja 2025 Sekretariat Setda Provinsi Gorontalo terdiri dari 4 (empat) tahapan besar yaitu :

1. Tahap persiapan

Tahapan ini mencakup pembentukan Tim Penyusun Renja OPD dan penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja;

2. Tahap Perumusan/Penyusunan mencakup :

a).Rancangan Renja Sekretariat Setda Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Sebaliknya perumusan rancangan awal RKPD juga menerima masukan dari rancangan RPD;

b).Perumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah.

3. Tahap Verifikasi Rancangan.

4. Tahap Penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016);
 12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
 13. Peraturan Gubernur Gorontalo No 69 Tahun 2023 Tentang Perubahan Gubernur Gorontalo No 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
 13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);
 15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, maka

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai acuan atau pedoman bagi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih terencana, terarah dan terkendali;
2. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Biro-Biro pada Sekretariat Daerah dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun kedepan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan mendukung Kebijakan RKPD Provinsi Gorontalo 2025;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan dokumen penganggaran;
3. Memastikan dan menjamin kesesuaian dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
4. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Meningkatkan kinerja, koordinasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



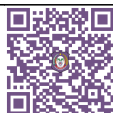
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- I. **PENDAHULUAN**, yang isinya memuat latar belakang secara ringkas pengertian Renja OPD, fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan, landasan hukum penyusunan Renja, serta maksud dan tujuan disusunnya Renja;
- II. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD** yang isinya memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2023, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, serta telaah usulan program dan kegiatan masyarakat;
- III. **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN** yang isinya memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, uraian program dan kegiatan serta program prioritas OPD;
- IV. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** yang isinya memuat tentang rencana kerja dan pendanaan OPD.
- V. **PENUTUP**

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





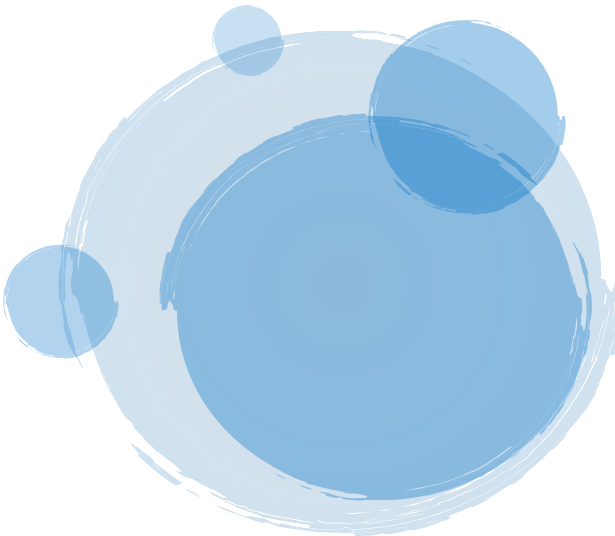
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

BERISI TENTANG EVALUASI PENYELENGARAAN
KEGIATAN TAHUN KEMARIN



Kantor Gubernur
Gorontalo
Kel Botu



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

Pada dasarnya evaluasi pelaksanaan Renja OPD penting dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun lalu 2023 serta perkiraan capaian tahun berjalan 2024.

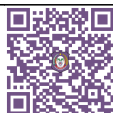
Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro-Biro Lingkup Setda Provinsi Gorontalo tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Yang meliputi antara lain :

- 1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- 4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.
- 5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (RENJA) tahun lalu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro-Biro lingkup Setda Provinsi Gorontalo. Dari pelaksanaan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan capaian RENSTRA 2023-2026 Biro-Biro pada Setda Provinsi Gorontalo yang menjadi Program dan Kegiatan sebagai berikut dalam Tabel T-C.29 terlampir

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



A. Biro Pemerintahan dan Kesra

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD dan Pencapaian RENSTRA OPD s/d Tahun 2023

KEPMENDAGRI NOMOR 1317 TAHUN 2023		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023		
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pesentase
1		2	4	5	6	7	8
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		IK 1: IKM BIRO IK 2: LAKIP BIRO	IK 1 : 80 IK 2 : 1 Laporan	Rp 5,906,280,309	IK 1 : 87,52 IK 2 : 1 Laporan	Rp 5,355,746,046	91%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah		Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 222,200,037	100%	214,879,409	97%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6	Rp 222,200,037	6	214,879,409	97%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 198,749,000	100%	196,447,021	99%
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Rp 198,749,000	20	196,447,021	99%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 793,623,000	100%	776,678,786	98%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Rp 793,623,000	4	776,678,786	98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 4,229,728,272	100%	3,710,048,777	88%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	Rp 4,229,728,272	36 Orang	3,710,048,777	88%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 461,980,000	100%	457,692,053	99%
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp 461,980,000	1	457,692,053	99%
II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		PRESENTASE PD YANG MENYAMPAIKAN LPPD TEPAT WAKTU	100%	Rp 3,439,836,146	100%	Rp 3,292,833,306	96%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100%	Rp 764,958,082	100%	Rp 737,508,418	96%
-	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1	Rp 100,000,000	1	98,048,833	98%
-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	6	Rp 187,409,581	6	177,262,269	95%
-	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2	Rp 477,548,501	2	462,197,316	97%
Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	Rp 912,439,032	100%	Rp 871,324,261	95%
-	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	6	Rp 379,999,956	17	361,947,449	95%
-	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1	Rp 183,000,000	1	178,701,148	98%
-	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Rp 349,439,076	1	330,675,664	95%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini


Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	Rp 425,000,000	100%	Rp 406,338,183	96%
-	Fasilitasi Kerja sama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	5	Rp 152,845,000	14	142,435,225	93%
-	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	3	Rp 103,723,000	24	97,169,839	94%
-	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	5	Rp 168,432,000	12	166,733,119	99%
III. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		PERSENTASE LEMBAGA BINA MENTAL SPIRITUAL YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA	100%	Rp 34,816,579,848	100%	Rp 33,524,259,103	96%
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100%	Rp 26,474,359,644	100%	Rp 25,404,369,318	96%
-	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Rp 626,862,524	1	621,675,192	99%
-	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	300	Rp 25,847,497,120	1102	24,782,694,126	96%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	Rp 8,242,222,094	100%	8,031,745,136	97%
-	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sosial (Dokumen Beasiswa Yang ditindaklanjuti)	800	Rp 8,242,222,094	1479	8,031,745,136	97%
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	Rp 99,998,110	100%	88,144,649	88%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



-	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	Rp 99,998,110	1	88,144,649	88%
				Rp 42,825,257,271		Rp 40,895,176,011	95%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



B. Biro Hukum

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo
Capaian Renstra Biro Hukum s/d Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM RENSTRA SKPD (TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN (N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Admnistrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di adakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentanse Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4:01:05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.05.1.01	Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.05.1.02	Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Gorontalo

Nama SKPD : BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI GORONTALO

Lembar :

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IKM BIRO	80,00					80%		
		LAKUP BIRO	1 Lap					1 Lap		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30 Dokumen	100%
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	24 Dokumen%	100%
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	100%	28 Orang/ Bulan	84 Orang/Bulan	100%
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 paket	100%
	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	16 Orang	48 Lap	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	45 Laporan	100%
	- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	18 Unit	100%
	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100%
	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100%
	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	18 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	75 Unit	100%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	21 Unit	100%
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	45 Unit	100%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	24 Dokumen	100%
	- Sub KegiatanFasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	100%
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	24 Dokumen	100%
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	100%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	24 Dokumen	100%
	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	100%
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	36 Lap	100%
	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
	- Sub Kegiatan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

GORONTALO, Agustus 2024
Pit. KEPALA BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI GORONTALO



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



D. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1														
1	01				Bidang Urusan Wajib									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IKM						80%		
						LAKIP						1 Lap		
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	4 dok	50%
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	32 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	4 dok	50%
					Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan laporan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	75%
					Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor (Biro Organisasi)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	75%
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	20 Orang	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	135 orang	33 orang	33 orang	33 orang	100%	35 orang	35 orang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	135 Orang	33 orang	33 orang	33 orang	100%	35 orang	35 orang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap
				Pelayanan Jasa Administarsi Perkantoran (Biro Organisasi)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap
				Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ Provinsi Gorontalo	9/9 Proaktif	8/9 Proaktif	9/9 Proaktif	9/9 Proaktif		100%	
				Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyelenggaraan PBJ	100%				100%	100%	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	16 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100%	4 lap	2 lap
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	16 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100%	4 lap	2 lap
				Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	48 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	6 lap
				Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Presentase Layanan SPSE dan Pengembangan Sistem Informasi	100%					100%	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	2 lap	38%
				Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	2 lap	38%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	2 lap	38%
				Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prenstase Pendampingan, Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ	100%					100%		
				Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	15 orang	50%
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	2 lap	38%
				Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	2 dok	38%

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Gorontalo

Sultan Kalupe, S.T., M.T

PEMBINA UTAMA MUDA IV C
Nip. 197410102003121010

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



E. Biro Organisasi

Kode					Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1														
1	01				Bidang Urusan Wajib									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IKM	80%					80%		
						LAKIP	1 Lap					1 Lap		
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	22 dok	6 dok	7 dok	7 dok	100%	5 dok	18 dok	82%
					Sub Kegiatn Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	22 dok	6 dok	7 dok	7 dok	100%	5 dok	18 dok	82%
					Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan laporan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket, 12 lap	3 paket	3 paket	3 paket	100%	9 paket	9 paket	75%
					Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor (Biro Organisasi)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	9 paket	9 Paket	75%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



				Kegiatan Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya	48 Orang	10 orang	12 orang	12 orang	100%	20 orang	34 org	71%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	48 Orang	10 orang	12 orang	12 orang	100%	20 Orang	34 org	71%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	120 org, 48 Lap	3 Lap	26 org, 12 lap	26 org, 12 lap	100%	32 orang, 12 lap	32 orang, 12 lap	114%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	120 orang	34 ASN	26 org	26 org	100%	32 orang	92 orang	77%
				Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	48 lap	3 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	75%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	24 Lap	6 lap	6 lap	6 lap	100%	6 lap	18 Lap	75%
				Pelayanan Jasa Administarsi Perkantoran (Biro Organisasi)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Lap	6 lap	6 lap	6 lap	100%	6 lap	18 lap	75%
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik	78.50%					78.50		
					Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan kategori BB	70%					75.01		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah PD yang ditata kelebagaannya	29 OPD					29 OPD		
					Jumlah PD/kota yang di evaluasi kelebagaannya	6 Kab/kota					6 Kab/kota		
					Persentase PD yang telah menyusun Anjab yang sesuai dengan struktur Organisasi yang berlaku	100%					100%		
				Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	3 Dok (12 Perangkat Daerah)	12 OPD	12 OPD	12 OPD	100%	1 dok	28 OPD provinsi	64%
				Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	12 dok Anjab, abk dan Evjab	2 dok	12 dok	12 dok	100%	4 dok	18 dok	41%
				Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	24 dok Kab/kota	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 kab/kota	18 dok	75%
				fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah PD dan Kab/kota yang menerapkan RB dengan kategori baik	29 PD, 6 kab/kota					29 PD, 6 kab/kota		
					Jumlah PD dan kab/kota dengan predikat Akip baik	29 PD, 6 kab/kota					29 PD, 6 kab/kota		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Jumlah PD yang menerapkan budaya kerja sesuai ketentuan	29 PD, 6 kab/kota					29 PD, 6 kab/kota		
					Jumlah PD yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintah	29 PD, 6 kab/kota					29 PD, 6 kab/kota		
					Jumlah PD yang menerapkan aspek pelayanan publik	29 PD, 6 kab/kota					29 PD, 6 kab/kota		
				Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi	132 dok	1 dok	33 dok, 1(PMPRB) 32 PMPRB OPD	33 dok, 1(PMPRB) 32 PMPRB OPD	100%	33 Dok (1 PMPRB	3 Laporan	2%
				Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	136 dok (4 dok PK pemda, 4 dok LKIP Pemda dan 128 dok. Sakip OPD	32 OPD, 6 Kab/kota	34 dok(1 dok PK, Pemda,1 dok LKIP, pemda, 32 dok Sakip OPD)	34 dok(1 dok PK, Pemda,1 dok LKIP, pemda, 32 dok Sakip OPD)	100%	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD	102 dok	75%
				Kegiatan Evaluasi PelaksanaanBudaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	5 dok (4 dok evaluasi Budaya kerja, 1 dok penguatan dan internalisasi budaya kerja	1 dok	2 dok evaluasi BK, 1 dok penguatan dan internalisasi budaya kerja	2 dok evaluasi BK, 1 dok penguatan dan internalisasi budaya kerja	100%	1 Laporan	4 lap	80%
				Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan Peta Proses Bisnis, SOP.	3 dok	1 dok	25 dok (1 dok probis Pemda,12 ProbisOPD, 12 dok IKM)	25 dok (1 dok probis Pemda,12 ProbisOPD, 12 dok IKM)	100%	3 dok	29 dok	967%
				Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan dan monev Inovasi Pelayanan Publik	7 dok	3 dok	29 dok (12 dok SP, 5 dok IPP, 12 dok IKM)	29 dok (12 dok SP, 5 dok IPP, 12 dok IKM)	100%	7 dok	39 dok	557%

Catatan:

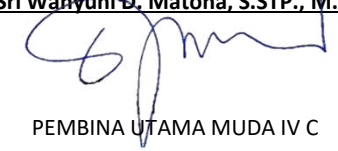
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Gorontalo

Sri Wahyuni D. Matona, S.STP., M.Si



PEMBINA UTAMA MUDA IV C

Nip. 197704011996122001

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



F. Biro Umum

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Gorontalo

Kode				Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Program Renstra SKPD (Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Perencanaan									
1	01			Bidang Urusan Wajib									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	IKM Biro	80					80		
					Lakip Biro	1 Lap					1 Lap		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan serta evaluasi kinerja	8 Dok	49 Dok	8 Dok	8 Dok	100%	8 Dok	65 Dok	900%
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja	3 Dok	9 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	15 Dok	500%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 Dok	5 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	7 Dok	700%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah asset dan Bantuan Barang Hibah Milik Pemprov Gorontalo yang terinventarisir	1 Lap	51 Lap	1 Lap	12 Lap	100%	1 Lap	64 Lap	6400%
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran	22 Paket	110 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	21 Paket	151 Paket	700%
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas /kompetensinya melalui diklat/bimtek	20 Org	120 Org	20 Org	20 Org	100%	20 Org	160 Org	800%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	3 Lap	300%
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	300%	300%
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	100 % 16 Unit	100%
			Kegiatan Fasilitas Keprotokoleran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	100 % 2 Lap	100%
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu KDH dan WKDH	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	100% 2 Lap	100%
				Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	100% 2 Lap	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



G. Pimpinan Sekretariat Daerah

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Gorontalo

Kode				Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Perencanaan									
1	01			Bidang Urusan Wajib									
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IKM	80					80		
					LKIP Biro	1 Lap					1 Lap		
1	01	01	01	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang dan Paket Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Org, 1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1	01	01	02	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekertariat Daerah yang disediakan	36 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis kinerja pelayanan OPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kinerja Biro-Biro pada Tahun 2022 dapat dinilai masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam Renstra masing-masing Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Untuk Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro-Biro dan terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target seperti yang telah ditentukan oleh Renstra. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat pengurangan belanja yang anggarannya dialihkan pada program-program penanggulangan Covid-19. Hal ini cukup berpengaruh pada pencapaian realisasi dan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo dan dokumen Renstra. Dalam rangka evaluasi kinerja Biro-Biro di Lingkup Sekretariat Daerah telah dilaksanakan analisis kinerja terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah yang dapat ditampilkan pada tabel beriku

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



A. Biro Pemerintahan dan Kesra

TABEL. T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Perangkat Daerah				Proreksi		Catatan Analisis
				Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Tahun N	Tahun N+1	
				2023	2025	2025	2026	2023	2025	2025	2026	2023	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
2	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat			6	6	6	6	6	-	-	-	6	6	Tercapai Sesuai Target
4	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
5	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			15	15	15	15	9	-	-	-	20	20	Anggaran memungkinkan dapat mengakomodir lebih dari target capaian indikator

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



6	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
7	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	-	-	-	4	4	Tercapai Sesuai Target
8	Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
9	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			36	36	36	36	36	-	-	-	36	36	Tercapai Sesuai Target
10	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	Tercapai Sesuai Target
12	Persentase Pelayanan dan Fasilitas Tugas Pemerintahan dan Otonomi Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
13	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
14	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	Tercapai Sesuai Target
15	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			6	6	6	6	6	-	-	-	6	6	Tercapai Sesuai Target
16	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah			2	2	2	2	2	-	-	-	2	2	Tercapai Sesuai Target
17	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



18	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			6	6	6	6	7	-	-	-	10	6	Anggaran memungkinkan dapat mengakomodir lebih dari target capaian indikator
19	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan			1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	Tercapai Sesuai Target
20	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	Tercapai Sesuai Target
21	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
22	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi			5	5	5	5	5	-	-	-	5	5	Tercapai Sesuai Target
23	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi			3	3	3	3	3	-	-	-	3	3	Tercapai Sesuai Target
24	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi			5	5	5	5	5	-	-	-	5	5	Tercapai Sesuai Target
25	Persentase Fasilitasi Bina Mental Spritual, Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
26	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
27	Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang Dikelola			1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	Tercapai Sesuai Target

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



28	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi			150	150	150	150	669	-	-	-	669	669	Tambahan Anggaran untuk mengakomodir Pokok pikiran DPRD sehingga capaian kinerja melebihi dari target capaian indikator
29	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target
30	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sosial (Dokumen Beasiswa Yang ditindaklanjuti)			800	800	800	800	972	-	-	-	972	972	Tambahan Anggaran untuk mengakomodir Pokok pikiran DPRD sehingga capaian kinerja melebihi dari target capaian indikator
31	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Tercapai Sesuai Target

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



32	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan			1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	Tercapai Sesuai Target
----	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



B. Biro Hukum

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kode				Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01			SEKRATARIAT DAERAH									
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN serta Dokumen Administrasi Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	05		PROGRAM FASILITAS DAN KOORDINASI HUKUM	Pesentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	05	1.01	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	05	1.02	Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



C. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Nama SKPD : BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINS GORONTALO

No	Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti dalam rangka penyerapan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



D. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 4
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintah OPD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat kematangan UKPBJ	9/9 proaktif		8/9 proaktif	9/9 proaktif	1/9 strategis	3/9 strategis	8/9 proaktif	9/9 proaktif	1/9 strategis	3/9 strategis	

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Gorontalo

Sultan Kalupe, S.T., M.T

PEMBINA UTAMA MUDA IV C
Nip. 197410102003121010

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



E. Biro Organisasi

F. Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan dan monev Inovasi Pelayanan Publik	-	-	3 dok	29 dok (12 dok SP, 5 dok IPP, 12 dok IKM)	29 dok (12 dok SP, 5 dok IPP, 12 dok IKM)	21 Dok (8 Dok SP, 5 Dok IPP, 8 Dok IKM)	100%	100%	100%	100%	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



f. Biro Umum

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Jumlah Total	Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2021	%	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(13)
1	Persentase Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	-	-	8	8	8	8	32	8	100%	8	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3	3	3	3	12	3	100%	3	
2	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Umum)	-	-	75	80	85	90	330	100%	100%	75	
	Jumlah dokumen laporan keuangan	-	-	1	1	1	1	4	4	100%	4 Lap	
3	Persentase Pelaksaasn Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	14	100%	100%	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1	1	1	1	4	14	100%	1 Lap	
4	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	20	20	20	20	80	30	60%	45 Org	
5	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	28	100%	100%	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	21 Paket	22 Paket	23 Paket	24 Paket	86 Paket	28	100%	25 Paket	
6	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	4 Lap	100%	100%	1 Lap	
7	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	-	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	88 Unit	24 Unit	100%	22 Unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	32 Unit	100%	100%	100%	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

8	Persentase Pelayanan Keprotokolan yang dilaksanakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	100%	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	4 Lap	42 Lap	100%	1 Lap	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	4 Lap	-	-	1 Lap	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	-	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	4 Lap	100%	100%	1 Lap	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



G. Pimpinan Sekretariat Daerah

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daearh				Jumlah Total	Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun (thn 2021)	%	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(13)
1	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			7	7	7	7	28	7	100%	7 Org	
2	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	12 Kali	12 kali dan 3 paket	100%	
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2	2	2	2	8	2	100%	2	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2	2	2	2	8	-	-	-	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1	1	1	1	4	-	-	-	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2	2	2	2	8	2	100%	2	
3	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	-	-	12	12	12	12	48	12 kali dan 3 paket	100%	12 kali dan 3 paket	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	-	12	12	12	12	48	12 kali dan 3 paket	100%	12 kali dan 3 paket	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	-	12	12	12	12	48	5 kali dan 1 paket	100%	5 kali dan 1 paket	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo adalah unit kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa kendala sehingga hal tersebut menjadi isu strategis yang sangat penting.

a). Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Biro Pemerintahan dan Kesra

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut (Biro Pemerintahan dan Kesra) :

Adapun isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Biro Pemerintahan dan Kesra antara lain:

- a. Penegasan Batas daerah; Meskipun Permendagri tentang batas daerah telah ditetapkan namun masih terdapat klaim batas daerah antar Kab/Kota, sehingga perlu mendapat perhatian utama agar stabilitas daerah kondusif.
- b. Penegasan batas daerah perlu lebih dimaksimalkan, agar dapat meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan maupun Desa, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pemasangan pilar batas. Dalam periode renstra 2023-2026 pemasangan pilar yang direncanakan di beberapa lokasi yang dianggap penting diantaranya Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Buol, Kabupaten parimo dan kabupaten pohuwato, kabupaten pohuwato dan kabupaten boalemo serta kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
- c. Pengembangan Daerah Otonom Baru; dalam rangka memperpendek rentang kendali terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu diusulkan pemekaran Kab/Kota di Provinsi Gorontalo
- d. Optimalisasi kerjasama antar pemerintah Daerah, Vertikal dan Swasta; bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



saat ini Provinsi Gorontalo sangat bergantung pada dana transfer daerah, sehingga perlu dioptimalkan kerjasama baik antar pemerintah daerah, vertical maupun swasta untuk mendapatkan sumber dana tambahan PAD.

- e. Peningkatan sumber daya manusia; bahwa selain mempunyai fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, juga mempunyai peran pemberian bantuan Pendidikan berupa beasiswa bagi masyarakat umum.
- f. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual; sehingga perlu adanya pemberian bantuan social dan hibah keagamaan.
- g. Pelaksanaan Fasilitas Ibadah Haji bagi Jamaah Haji asal Provinsi Gorontalo; salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda No. 5 Tahun 2013) tentang Haji. Dalam salah satu pasal yang ada dalam Perda Haji tersebut adalah pasal yang mengatur tentang pembiayaan transportasi lokal yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dan tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Fasilitas ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2. Biro Hukum

Isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum meliputi :

- Rentang waktu fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota oleh Pemerintah Provinsi yang hanya dibatasi selama 15 hari sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sangat singkat.
- Penyesuaian dan atau pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menghasilkan OPD yang ideal.
- Penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peningkatan Pelayanan hukum kepada masyarakat melalui sidang itsbat nikah mobile mengingat masih banyak pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah (nikah siri)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- Penguatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) perlu untuk terus dilakukan sehingga dapat secara maksimal memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Biro Hukum yaitu :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang :
 - ❖ Penyusunan dan *legal drafting* produk hukum
 - ❖ Norma, standar, prosedur dan kriteria
 - ❖ Hukum Tata Negara/ Administrasi Pemerintahan
 - ❖ *Public Relation dan Kerja Sama*
2. Perubahan regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri) yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang meliputi :
 - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - d. Peraturan Menteri lainnya terkait pedoman penataan kelembagaan perangkat daerah
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Permasalahan yang dihadapi dan berpengaruh terhadap pelayanan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Gorontalo :

a. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang Hukum.

b. Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan Fungsi.

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

3. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

Isu-isu strategis pelaksanaan tugas Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan antara lain:

Dalam rangka pencapaian visi RPJMD dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang dihubungkan dengan peran strategis sesuai tugas dan fungsi Biro Pengendalian Ekgang, maka isu-isu strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan tingkat provinsi masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat melalui frekwensi rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan, respon aparat untuk hadir, dan jumlah rekomendasi yang diakomodir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 yang direvisi menjadi PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memperkuat tupoksi Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Rakorev tingkat provinsi;
2. Kualitas penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) masih perlu ditingkatkan, dimana tidak hanya memberikan perhatian khusus bagi SKPD dengan tingkat capaian pelaksanaan fisik dan serapan anggaran yang tidak memenuhi target, namun juga bagi OPD yang kurang memperhatikan capaian outcome/hasil dan impact/dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pelaksanaan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- program pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini dapat diukur dari frekuensi Rapim yang diadakan dan jumlah rekomendasi yang diakomodir setelah pelaksanaan Rapim;
3. Lambatnya penyerapan anggaran belanja pada APBD Provinsi Gorontalo. Isu ini memantapkan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan pada fungsi pengendalian pembangunan, meliputi penguatan peran TEPRABiro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dalam penyediaan data yang akurat dan real time untuk solusi dan deteksi dini atas permasalahan lapangan melalui pemanfaatan sistem aplikasi e-monev, peningkatan kualitas koordinasi dan evaluasi kinerja OPD melalui Rapim dan peningkatan intensitas dan kualitas monitoring lapangan dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan;
 4. Pemanfaatan Sistem e-monev (elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan) demi terselenggaranya sistem informasi e-monev mencakup pelaporan realisasi capaian pembangunan, baik kinerja serapan keuangan maupun kinerja fisik pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. Lambatnya peningkatan ekonomi kerakyatan di Provinsi Gorontalo. Isu ini memantapkan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan pada fungsi pengendalian ekonomi, meliputi penguatan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dalam penyediaan data yang akurat dan real time untuk solusi dan deteksi dini terjadinya inflasi dan lonjakan harga di pasaran, peningkatan kualitas koordinasi melalui HLM (*High Level Meeting*) TPID, Rakorev bidang ekonomi, Monitoring Ketersediaan BBM dan Monitoring LPG;
 6. belum berjalan optimalnya kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah, sehingga hal ini menyebabkan belum terpenuhinya tujuan pendirian BUMD dalam memajukan ekonomi daerah dan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan termasuk memberi kontribusi bagi pemerintah daerah dalam bentuk Deviden;
 7. belum adanya BUMD air minum di Provinsi Gorontalo yang memiliki tarif yang full cost recovery, sehingga berdasarkan Permendagri 21 tahun 2020, memberikan kewenangan kepada Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum untuk kabupaten/kota dan provinsi;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Gorontalo terdapat beberapa isu penting antara lain :

1. UKPBJ Provinsi Gorontalo merupakan unit kerja yang telah mengakomodir penggabungan ULP dan LPSE dalam satu wadah dan memiliki tugas memberikan dukungan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Prov. Gorontalo mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017-2022 yakni mewujudkan Biro Pengadaan sebagai Center Of Excelent (sebagai pusat unggulan), UKPBJ sebagai Center of Excelent (pusat keunggulan PBJ) adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Sesuai Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 11 tercantum bahwa "UKPBJ adalah unit kerja di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan PBJ, dengan adanya perubahan ULP menjadi UKPBJ terlihat adanya perluasan fungsi sehingga untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi perluasan peran UKPBJ, LKPP RI sebagai instansi Pembina dan regulator dibidang PBJ menyiapkan alat ukur guna melihat sejauhmana progress perubahan mencapai Center Of Excelent menggunakan indikator kematangan UKPBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal dan eksternal.
4. Sesuai Edaran Kepala LKPP RI Nomor 33 Tahun 2020 bahwa dalam hal setelah dilakukan penugasan masih terdapat kekurangan ASN pengelola pengadaan barang/jasa untuk ditugaskan sebagai pokja pemilihan/pejabat pengadaan maka pemerintah daerah menugaskan ASN yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar dibidang PBJ sebagi pokja pemilihan/pejabat pengadaan sampai dengan 31 Desember 2023.
5. Menyingkapi diterbitkannya Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) nomor 12 tahun 2015 tentang pengembangan kompetensi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa, maka kemampuan SDM

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



pengelola dan, pelaksana perlu terus ditingkatkan sebagai wujud pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.

6. (Value for money dalam value procurement) proses pengadaan atau pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum telah menjadi fungsi pendukung yang semakin berperan dalam instansi pemerintah, tidak hanya menjadi sebuah wahana dalam belanja pemerintah semata, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki potensi tidak sebatas operasi yang semakin efektif dan efisien semata, pengadaan yang tepat diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan tepat penyedia selain memberikan dampak yang signifikan untuk menghemat waktu dan menghemat uang juga menjadi sebuah proses yang penting untuk menciptakan kualitas layanan publik yang semakin baik, tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengadaan dalam situasi tertentu dapat menciptakan penciptaan nilai yang menunjang citra pemerintah disisi lain saat terjadi proses yang melanggar prinsip, tujuan, kebijakan, dan etika akan merusak dan memalukan bahkan konsekuensi hukum dari pejabat public.
7. Pejabat yang membidangi/menjadi *leading sector* di proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam keahliannya pada suatu titik kritis dalam pengambilan keputusan tidak dapat mengambil keputusan bila tidak menjadi bagian dari pengambil keputusan strategis/utama, organisasi pemerintah yang masih menyisihkan *Leading Sector* dari proses bisnis *Good Governance* maupun pemerintahan akan tertatih-tatih bila menganggap fungsi pengadaan hanya sekedar sebagai "eksekutor", proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sejak identifikasi kebutuhan yang erat kaitannya dengan perencanaan pengadaan yang berjalan paralel dengan proses perencanaan anggaran bila hanya dihadirkan tanpa diikuti dengan kewenangan untuk mempengaruhi keputusan manajemen akan menghasilkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak efektif dan efisien.

5. Biro Organisasi

Isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi meliputi :

- Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



ukuran serta efektif dan efisien.

- Penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai ketentuan perundangan.
- Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang meliputi pelaksanaan budaya kerja, peningkatan akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju birokrasi kelas dunia.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Biro Organisasi yaitu :

a. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.

Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang penataan organisasi.

b. Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan Fungsi.

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

c. Reformasi Birokrasi

Isu dan permasalahan terkait dengan Reformasi Birokrasi mencakup target Indeks Reformasi Birokrasi yang belum tercapai baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Hal ini termasuk upaya mendorong perbaikan budaya kerja serta fasilitasi implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh OPD.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



d. Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian target atas akuntabilitas kinerja baik Pemerintah Daerah maupun setiap OPD masih membutuhkan kerja keras sehingga target yang dituangkan dalam RPJMD dapat tercapai. Hal tersebut dapat didukung oleh pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja serta peningkatan kapasitas SDM evaluator internal.

Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja..

Fungsi pembinaan dan pengawasan Kab/Kota belum maksimal antara lain karena belum adanya pedoman teknis monitoring akuntabilitas kinerja.

e. Penataan Kelembagaan

Saat ini, isu penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah lagi gencar-gencarnya. Berbagai kebijakan dan regulasi terkait penataan kelembagaan telah ditelurkan oleh Pemerintah Pusat sehingga menuntut penataan kembali terhadap Perangkat Daerah mulai dari struktur organisasi beserta jabatan struktural yang ada didalamnya. Berbagai isu penataan kelembagaan itulah yang membuat perangkat daerah belum sepenuhnya ideal, belum tepat ukuran dan dan tepat fungsi.

f. Ketatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, penyusunan dan penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP belum optimal, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD, sehingga masih diperlukan pendampingan dan fasilitasi guna optimalisasi penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP.

Selain itu, penyusunan pedoman standarisasi ruangan, tata naskah dinas, pakaian dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo juga masih perlu perbaikan.

g. Pelayanan Publik

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Belum tersusunnya standar pelayanan pada setiap OPD, sebagaimana amanah Peraturan Menteri PAN RB No. 15 Tahun 2014 sehingga perlu dorongan dan fasilitasi dalam penyusunannya. Perlunya mendorong OPD untuk melakukan inovasi pelayanan publik dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

6. Biro Umum

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas Biro Umum antara lain:

- a. Penyelenggaraan administrasi surat-menyurat di Lingkungan Biro Umum belum menggunakan Digitalisasi;
- b. Data Kepegawaian di Lingkungan Setda belum up to date;
- c. Belum efektifnya sistem manajemen aset di Lingkungan Biro Umum;
- d. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keahlian teknis khususnya Pengadaan Barang Jasa dan Teknis Konstruksi serta Tenaga Konsultan Perencanaan;
- e. Kurangnya ASN dengan kompetensi teknis seperti Kelistrikan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan;
- f. Kualitas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah masih belum optimal;
- g. Belum adanya penanggungjawab pengelola barang inventaris dinas di Lingkungan Rumah Jabatan Pimpinan;
- h. Belum efektifnya penyusunan dokumen laporan keuangan di Lingkungan Setda Provinsi Gorontalo;
- i. Pelayanan keprotokolan pimpinan khususnya dalam penyusunan agenda pimpinan belum optimal;

b) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu pelayanan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat dinamis yang terus berkembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajerial dalam membawa organisasi untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan hal yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kekuatan (Strengths)

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan umum, administrasi pembangunan daerah, dan kemasyarakatan.
2. Visi dan Misi organisasi yang jelas.
3. Komitmen dan kemauan pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Kualitas SDM Aparatur yang belum memadai.
2. Belum optimalnya dukungan dalam penerapan kebijakan.
3. Belum lengkapnya prosedur operasi baku (*Standard Operating Procedure*).
4. Belum optimalnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi.
6. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tugas organisasi.
2. Agenda pembangunan yang lengkap.
3. Kondisi dan situasi wilayah Provinsi Gorontalo yang relatif stabil dan kondusif.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Pengembangan teknologi informasi dan pengembangan jaringan sistem informasi manajemen dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi.
5. Adanya Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
6. Adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN.

D. Tantangan / Ancaman (Threats)

1. Adanya tuntutan untuk menerapkan *good governance* dan *clean government*.
2. Melaksanakan sinergi antara *good governance* dan *reinventing government*.
3. Rendahnya tingkat disiplin sebagian pegawai.
4. Kebijakan Refocussing anggaran.
5. Kebijakan yang sewaktu-waktu dapat berubah (fleksibel).
6. Masih terjadinya tumpang-tindih / *overlapping* tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan sanksi tindak lanjut hasil pengawasan.
8. Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang prima).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja setiap tahun. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja berdasarkan Rancangan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan OPD. Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan usulan program dan kegiatan berdasarkan penjabaran dari Renstra. Hasil analisis kebutuhan untuk rumusan program dan kegiatan sesuai dengan yang terdapat pada rancangan awal RKPD sehingga tidak terdapat perbedaan antara usulan Rencana Kerja dan RKPD. Untuk lebih jelasnya Review terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



A. Review Rancangan Awal RKPD Biro Umum Setda Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Biro Umum						56.976.099.502,00							73.645.594.791,00	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						56.976.099.502,00							73.645.594.791,00	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH						56.976.099.502,00							73.645.594.791,00	
13	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	LAKIP Biro IKM Biro	-			1 Laporan 80	56.976.099.502,00						-	73.645.594.791,00	
	4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Lap 8 Dok	176.541.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	161.677.767,00	
	4	01	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												139.571.704,00	BIRO UMUM
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	126.141.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo			
	4	01	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	50.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	22.106.063,00	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	10.632.442.643,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	10.842.513.031,00	
	4	01	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan	10.516.760.643,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		10.701.031.235,00	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	115.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		141.481.796,00	BIRO UMUM
	4	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			1 Lap	159.982.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	207.133.271,00	
	4	01	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	159.982.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		207.133.271,00	BIRO UMUM
	4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			20 orang	279.674.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	223.300.379,00	
	4	01	01	1.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	279.674.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		223.300.379,00	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			22 Paket	7.505.741.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	2.815.311.598,00	
	4	01	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

Catatan

Catatan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	7.505.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		2.815.311.598,00	BIRO UMUM
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Lap	4.385.479.960,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	4.429.679.960,00	
	4	01	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

b

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.385.479.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		4.429.679.960,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			30 Unit	5.391.770.394,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	5.157.782.758,00				
	4	01	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	1.224.258.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		1.178.856.749,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	4.167.511.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		3.978.926.009,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang dan Paket Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			1 Paket 6 Orang	2.066.876.510,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	2.067.876.510,00				
	4	01	01	1.11	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	323.676.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		323.676.510,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.11	000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	393.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		394.200.000,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.11	000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		100.000.000,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.11	000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		1.250.000.000,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekertariat Daerah yang disediakan	-			36 Paket	25.141.640.825,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	46.173.178.688,00				
	4	01	01	1.12	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	8.045.747.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		8.325.980.616,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.12	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	7.239.244.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		7.499.477.500,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.12	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	9.856.648.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		30.347.720.572,00	BIRO UMUM			
	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	-			3 Lap	1.234.862.090,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	1.567.140.829,00				
	4	01	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	436.031.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		564.967.499,00	BIRO UMUM
	4	01	01	1.14	000		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	494.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		614.514.572,00	BIRO UMUM
	4	01	01	1.14	000		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	304.162.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		387.658.758,00	BIRO UMUM

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



B. Biro Organisasi

TABEL TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI GORONTALO

Nama SKPD : BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO

NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	IKM BIRO	80.00	5,127,580,810	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Organisasi	IKM BIRO	80	5,127,580,810	
			LAKUP BIRO	1 Lap				LAKIP BIRO	1 Lap		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	5 dok	218,757,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	5 dok	218,757,000	
-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 dok	218,757,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di laksanakan	5 dok	218,757,000	
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3 paket	702,372,200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3 paket	702,372,200	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

	-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	702,372,200		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Organisasi	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	702,372,200	
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	12 orang	0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Organisasi		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	12 orang	-	
	-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	0		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Biro Organisasi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	-	
5		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	32 orang, 12 lap	3,597,599,525		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Organisasi		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	32 orang, 12 lap	3,597,599,525	
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	3,516,613,025		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Organisasi	-	Jumlah ASN yang Di Berikan Gaji dan Tunjangan	32 orang	3,516,613,025	
	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	80,986,500		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Biro Organisasi	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	80,986,500	
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	608,852,085		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Peralatan dan	6 laporan	608,852,085.00	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



										Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	608,852,085		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Organisasi	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	608,852,085	
II	Program Penataan Organisasi		Provinsi Gorontalo	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	1,025,402,300	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi	Jumlah PD dan Kab./kota yang menerapkan RB dengan kategori baik		100%	1,025,402,300		
Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik				78.50	Jumlah PD dan kab/kota dengan predikat Akip baik				78.50					
Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan kategori BB				75.01	Jumlah PD yang menerapkan budaya kerja sesuai ketentuan				75.01					
6	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Provinsi Gorontalo	Jumlah PD yang ditata kelembagannya	29 OPD	388,871,500	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi		Jumlah PD dan Kab./kota yang menerapkan RB dengan kategori baik	29 OPD	388,871,500		
Jumlah PD/kota yang di evaluasi kelembagannya				6 Kab/kota	Jumlah PD dan kab/kota dengan predikat Akip baik					6 Kab/kota				

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



			Persentase PD yang telah menyusun Anjab yang sesuai struktur organisasi berlaku	100%						Jumlah PD yang menerapkan budaya kerja sesuai ketentuan	100%		
	- Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	4 Dok	180,805,000		Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Organisasi	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	8 dok	180,805,000	
	- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	4 dok Anjab, ABK, Evjab	208,066,500		Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Biro Organisasi	-	umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	8 dok, anjab, evjab, abk	208,066,500	
	- Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 kab/kota	0		Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Biro Organisasi	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 dok	-	
7	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Gorontalo	Jumlah PD dan Kab/kota yang menerapkan RB dengan kategori baik	29 PD, 6 kab/kota	636,530,800		Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi		Jumlah PD dan Kab./kota yang menerapkan RB dengan kategori baik	12 OPD, 6 Kab/kota	636,530,800	
			Jumlah PD dan kab/kota dengan predikat Akip baik	29 PD, 6 kab/kota						Jumlah PD dan kab/kota dengan predikat Akip baik	12 OPD, 6 Kab/kota		
			Jumlah PD yang menerapkan budaya kerja sesuai ketentuan	29 PD, 6 kab/kota						Jumlah PD yang menerapkan budaya kerja sesuai ketentuan	12 OPD, 6 Kab/kota		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



			Jumlah PD yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintah	29 PD, 6 kab/kota						Jumlah PD yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintah	12 OPD, 6 Kab/kota		
			Jumlah PD yang menerapkan aspek pelayanan publik	29 PD, 6 kab/kota						Jumlah PD yang menerapkan aspek pelayanan publik	12 OPD, 6 Kab/kota		
-	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	Terlaksananya penyusunan Peta Proses Bisnis, SOP.	3 dok	108,669,200		Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Biro Organisasi	-	Terlaksananya penyusunan Peta Proses Bisnis, SOP.	3 dok	108,669,200	
-	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Gorontalo	Terlaksananya fasilitas penyusunan dokumen pengusulan dan monev Inovasi Pelayanan Publik	7 dok	169,979,000		Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi	-	Terlaksananya fasilitas penyusunan dokumen pengusulan dan monev Inovasi Pelayanan Publik	7 dok	169,979,000	
-	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 lap	0		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Biro Organisasi	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 lap	-	
-	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 dok (1 dok PK Pemda, 1 dok LKIP, 32 dok Sakip OPD)	185,729,100		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi	-	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	185,729,100	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi	33 dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	172,153,500		Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	172,153,500		
JUMLAH					6,152,983,110	J U M L A H				6,152,983,110				

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



C. Biro Hukum

Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kimerja 2023	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kimerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	100%	5,277,959,778	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	100%	5,277,959,778	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan	100%	249,894,000	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan	100%	249,894,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelaksanaan Adminstrasi Keuangan Daerah	100%	4,248,498,150	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelaksanaan Adminstrasi Keuangan Daerah	100%	4,248,498,150	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Peresentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	125,598,780	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Peresentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	125,598,780	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	381,912,148	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	381,912,148	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di adakan	100%	46,976,100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di adakan	100%	46,976,100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	92,400,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	92,400,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	132,680,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	132,680,600	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Provinsi Gorontalo	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	2,581,537,500	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Provinsi Gorontalo	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	2,581,537,500	
	Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Provinsi Gorontalo	Persentase Produk Hukum yang disusun	100%	887,615,200	Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Provinsi Gorontalo	Persentase Produk Hukum yang disusun	100%	887,615,200	
	Fasilitas Bantuan Hukum	Provinsi Gorontalo	Persentase Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	1,693,922,300	Fasilitas Bantuan Hukum	Provinsi Gorontalo	Persentase Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	1,693,922,300	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



TABEL TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025
PROVINSI GORONTALO

Nama SKPD : BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI GORONTALO

NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penling
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	IKM BIRO	80,00	4.394.715.645	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	IKM BIRO	80,00	4.394.715.645	
			LAKUP BIRO	1 lap				LAKUP BIRO	1 lap		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	217.641.748	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	217.641.748	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dokumen	209.241.748	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dokumen	209.241.748	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.200.000	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.200.000	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.200.000	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.200.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD	100%	3.086.558.897	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD	100%	3.086.558.897	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	3.078.158.897	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	3.078.158.897	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.400.000	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.400.000	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	63.046.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	63.046.000	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	17.500.000	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	17.500.000	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya** melalui scan **QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	45.546.000	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	45.546.000	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	385.351.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	385.351.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.418.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.418.000	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	320.933.000	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	320.933.000	
	- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	48.000.000	- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	48.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	116.491.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	116.491.000	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		
	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	39.514.000	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	39.514.000	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Gorontalo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	76.977.000	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	76.977.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa yang Disediakan	2 Laporan	396.051.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa yang Disediakan	2 Laporan	396.051.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	83.211.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	83.211.000	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	312.840.000	-Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	312.840.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	129.576.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	129.576.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	105.486.000	-Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	105.486.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	10.500.000	-Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	10.500.000	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Gorontalo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	13.590.000	-Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	13.590.000	
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Strategis	100%	2.179.042.550	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Biro Organisasi	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Strategis	100%	2.179.042.550	
1	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	8 Dokumen	1.474.990.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	8 Dokumen	1.474.990.000	
	- Sub KegiatanFasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dok	724.990.000	-Sub KegiatanFasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dok	724.990.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dok	750.000.000	-Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dok	750.000.000	
2	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	8 Dokumen	90.000.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	8 Dokumen	90.000.000	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4 Dok	90.000.000	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4 Dok	90.000.000	
3	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD	8 Dokumen	614.052.550	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD	8 Dokumen	614.052.550	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka	4 Dok	200.000.000	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka	4 Dok	200.000.000	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	4 Dok	414.052.550	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	4 Dok	414.052.550	
III	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Provinsi Gorontalo	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis	100%	672.910.318	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis	100%	672.910.318	
I	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah	12 Lap	659.230.318	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah	12 Lap	659.230.318	
	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	373.480.318	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	373.480.318	
	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	197.400.000	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	197.400.000	
	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Laporan	88.350.000	- Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Laporan	88.350.000	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
2	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	13.680.000	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	13.680.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	13.680.000	- Sub Kegiatan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	13.680.000	
JUMLAH					7.246.668.513	JUMLAH					7.246.668.513

GORONTALO, Agustus 2024
 Ptl. KEPALA BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
 SETDA PROVINSI GORONTALO

TAUFIK EL HAKIM SIDIKI, SE, MM
 NIP. 196809141997031005

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



E. Biro Pengadaan

TABEL TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI GORONTALO

Nama SKPD : BIRO PENGADAAN B/J SETDA PROVINSI GORONTALO

NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	IKM BIRO	80.00	7,346,733,065	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Pengadaan B/J	IKM BIRO	80	898,679,094	
			LAKIP BIRO	1 Lap				LAKIP BIRO	1 Lap		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	168,181,500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Pengadaan B/J	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	-	
-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	168,181,500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Pengadaan B/J	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	-	
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	275,858,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Pengadaan B/J	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	180,000,000	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

	-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	275,858,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	180,000,000	Baterai UPS Server dan Server Back-UP
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	10 orang	22,522,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Pengadaan B/J		Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	10 orang	-	
	-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	22,522,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Biro Pengadaan B/J		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	-	
4		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	6,194,935,470	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Pengadaan B/J		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	195,909,094	
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	6,194,935,470	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	195,909,094	TPP BK dan PK 1 Bulan
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	685,236,095	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Pengadaan B/J		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	522,770,000.00	
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	685,236,095	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	522,770,000	Honor PTT 9 Orang dan Kendaraan Dinas
II		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Tingkat Kematangan UKPBJ Provinsi Gorontalo	1/9 Level Strategis	1,238,097,100	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J		Tingkat Kematangan UKPBJ Provinsi Gorontalo	1/9 Level Strategis	9,900,000	
6		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Persentase Penyelenggaraan PBJ	100%	756,755,100	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J		Persentase Penyelenggaraan PBJ	100%	5,060,000	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Lap	133,365,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Lap	-	
	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Lap	408,623,100	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Lap	-	
	-	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Lap	214,767,000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 dok	5,060,000	Honor PTT 2 Orang
7		Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Provinsi Gorontalo	Presentase Layanan SPSE dan Pengembangan Sistem Informasi	100%	187,159,000	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Biro Pengadaan B/J	-	Presentase Layanan SPSE dan Pengembangan Sistem Informasi	100%	-	
	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Lap	63,102,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Lap	-	
	-	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap	85,398,000	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap	-	
	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap	38,659,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap	-	
8		Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Prenstase Pendampingan, Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ	100%	294,183,000	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Prenstase Pendampingan, Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ	100%	4,840,000	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

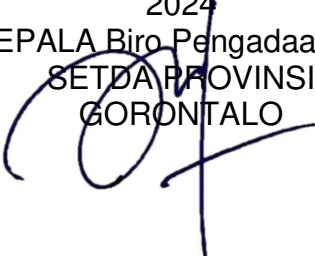
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini


-	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang, 2 Dok	121,692,000	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang, 2 Dok	-	
-	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok	113,689,000	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok	4,840,000	Honor PTT 2 Orang
-	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok	58,802,000	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan B/J	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok	-	
JUMLAH					8,584,830,165	J U M L A H					908,579,094	

GORONTALO, Agustus 2024

KEPALA Biro Pengadaan B/J
SETDA PROVINSI
GORONTALO



Sultan Kalupe, S.T., M.T

Nip. 197410102003121010

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



F. Biro Pemerintahan dan Kesra

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Gorontalo

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS RKPD						Catat an Penti ng
KEPMENDAGRI NOMOR 1317 TAHUN 2023 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			KEPMENDAGRI NOMOR 1317 TAHUN 2023 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			
			Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumb er Dana				Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumb er Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH	IK 1: IKM BIRO IK 2: LAKIP BIRO	Provinsi Goronta lo	IK 1 : 80 IK 2 : 1 Lapor an	Rp 6,268,009,3 45	APBD	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH	IK 1: IKM BIRO IK 2: LAKIP BIRO	Provinsi Goronta lo	100%	Rp 6,101,887,6 74	APBD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluating Kinerja	Provinsi Goronta lo	100%	Rp 221,510,037	APBD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluating Kinerja	Provinsi Goronta lo	100%	Rp 221,510,037	APBD	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



		Perangkat Daerah						Perangkat Daerah					
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Provinsi Gorontalo	6	Rp 221,510,037	APBD	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Provinsi Gorontalo	6	Rp 221,510,037	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 167,932,000	APBD		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 167,932,000	APBD
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Gorontalo	15	Rp 167,932,000	APBD	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Gorontalo	15	Rp 167,932,000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 667,430,000	APBD		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 667,430,000	APBD
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Gorontalo	4	Rp 667,430,000	APBD	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Gorontalo	4	Rp 667,430,000	APBD

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 4,747,180,777	APBD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 4,607,519,106	APBD	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	36 Orang	Rp 4,747,180,777	APBD	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	36 Orang	Rp 4,607,519,106	APBD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 463,956,531	APBD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 463,956,531	APBD	
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Gorontalo	1	Rp 463,956,531	APBD	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Gorontalo	1	Rp 437,496,531	APBD	
II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PRESENTASE PD YANG MENYAMPAIKAN LPPD TEPAT WAKTU	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 3,745,267,790	APBD	II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PRESENTASE PD YANG MENYAMPAIKAN LPPD TEPAT WAKTU	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 3,745,267,790	APBD	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini


Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 708,645,700	APBD	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 708,645,700	APBD
- Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	1	Rp 102,800,000	APBD	- Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	1	Rp 102,800,000	APBD
- Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Provinsi Gorontalo	6	Rp 237,409,700	APBD	- Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Provinsi Gorontalo	6	Rp 237,409,700	APBD
- Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	Provinsi Gorontalo	2	Rp 368,436,000	APBD	- Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	Provinsi Gorontalo	2	Rp 368,436,000	APBD
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 752,714,532	APBD	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 752,714,532	APBD
- Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Provinsi Gorontalo	6	Rp 415,302,256	APBD	- Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Provinsi Gorontalo	6	Rp 415,302,256	APBD
- Pengembang an Otonomi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembang	Provinsi Gorontalo	1	Rp 41,809,000	APBD	- Pengembang an Otonomi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembang	Provinsi Gorontalo	1	Rp 41,809,000	APBD

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini


	dan Penataan Urusan	n Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan						dan Penataan Urusan	n Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan					
-	Evaluasi dan Penyelenggara an Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggara an Pemerintahan	Provinsi Goronta lo	1	Rp 295,603,276	APBD	-	Evaluasi dan Penyelenggara an Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggara an Pemerintahan	Provinsi Goronta lo	1	Rp 295,603,276	APBD	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Provinsi Goronta lo	100%	Rp 501,600,000	APBD		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Provinsi Goronta lo	100%	Rp 501,600,000	APBD	
-	Fasilitasi Kerja sama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Provinsi Goronta lo	5	Rp 152,845,000	APBD	-	Fasilitasi Kerja sama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Provinsi Goronta lo	5	Rp 152,845,000	APBD	
-	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swast a	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Provinsi Goronta lo	3	Rp 103,723,000	APBD	-	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swast a	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Provinsi Goronta lo	3	Rp 103,723,000	APBD	
-	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Provinsi Goronta lo	5	Rp 245,032,000	APBD	-	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Provinsi Goronta lo	5	Rp 245,032,000	APBD	
	III. PROGRAM KESEJAHTERA AN RAKYAT	PERSENTASE LEMBAGA BINA MENTAL SPIRITUAL YANG DITINGKATK	Provinsi Goronta lo	100%	Rp 17,391,826, 200	APBD		III. PROGRAM KESEJAHTERA AN RAKYAT	PERSENTASE LEMBAGA BINA MENTAL SPIRITUAL YANG DITINGKATK	Provinsi Goronta lo	100%	Rp 17,391,826, 200	APBD	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		AN KAPASITASNYA						AN KAPASITASNYA					
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 13,601,421,686	APBD		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 13,601,421,686	APBD	
-	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Provinsi Gorontalo	1	Rp 878,205,700	APBD	-	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Provinsi Gorontalo	1	Rp 878,205,700	APBD	
-	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Provinsi Gorontalo	300	Rp 12,723,215,986	APBD	-	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Provinsi Gorontalo	300	Rp 12,723,215,986	APBD	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 8,000,825,094	APBD		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 8,000,825,094	APBD	
-	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan	Provinsi Gorontalo	800	Rp 3,690,404,514	APBD	-	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Gorontalo	800	Rp 3,690,404,514	APBD	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



	Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sosial (Dokumen Beasiswa Yang ditindaklanjuti)						Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sosial (Dokumen Beasiswa Yang ditindaklanjuti)					
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 100,000,000	APBD		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 100,000,000	APBD	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Provinsi Gorontalo	1	Rp 100,000,000	APBD	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Provinsi Gorontalo	1	Rp 100,000,000	APBD	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan					
				Rp 25,622,795,777						Rp 25,456,674,106		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi maupun perangkat daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan ke OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kab/Kota.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan disajikan pada Tabel-T.C-32.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



A. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi maupun perangkat daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan ke OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kab/Kota.

Pada Bagian Ini Biro Pemerintahan dan Kesra menjelaskan bahwa ditahun 2023 terdapat pengelolaan Pokok Pikiran DPRD tahun anggaran 2025, yang meliputi dua jenis Belanja yakni belanja Hibah dan Bansos pada Sub kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spritual dan belanja Beasiswa pada kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dalam pengelolaan Pokok Pikiran DPRD Biro Pemerintahan dan Kesra berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 215/I/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Kesejahteraan rakyat pada Pemberian Beasiswa pemerintah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monev Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Adapun usulan yang dapat ditindaklanjutan pada Pembahasan TAPD Provinsi Gorontalo hanya 7 usulan, dikarenakan usulan yang lain tidak mencantumkan Byname By Addres sesuai dengan ketentuan dan Arahan Bappeda saat pembahasan Rencana Kerja Tahun 2025. Berikut Gambar Usulan Pokok Pikiran Via SIPD yang dimaksud :

List Usulan Pokir



4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual

ID Usulan	Nama Pengusul	Usulan	Anggaran
945668	Sintje Kadji	Permohonan bantuan pembangunan Mesjid Al-Fattah Dusun Panua berupa atap dan Qubah mesjid	Rp 10,000,000
949192	Ir. Wasito Somawiyono	BANTUAN MASJID BAITAL MUSYAFIR	Rp 10,000,000
943875	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Masyarakat Membutuhkan Bantuan Hibah Pembangunan Pagar Masjid Al Mukaramah	Rp 10,000,000
945045	Meyke M. Camaru, SH	BANTUAN MASJID NURUL YAKIN	Rp 10,000,000
949097	Ir. Wasito Somawiyono	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AL MUHAJIRIN	Rp 10,000,000
949163	Ir. Wasito Somawiyono	BANTUAN RKB PONDOK PESANTREN SOROJUTH TOLIBIN	Rp 10,000,000
947341	Ir. Wasito Somawiyono	PEMBAGUNAN ASRAMA SANTRI PONDOK SIROJUTH THOLIBIN	Rp 10,000,000

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



B. Biro Umum Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Gorontalo

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo		
1.1	Perbaikan dan Pemeliharaan Asrama Mahasiswa Jakarta	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	M2 Paket	
1.1	Perbaikan dan Pemeliharaan Asrama Mahasiswa D.I Yogyakarta	Jogjakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	M2 Paket	
1.2	Perbaikan dan Pemeliharaan Asrama Mahasiswa Jawa Barat	Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	M2 Paket	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





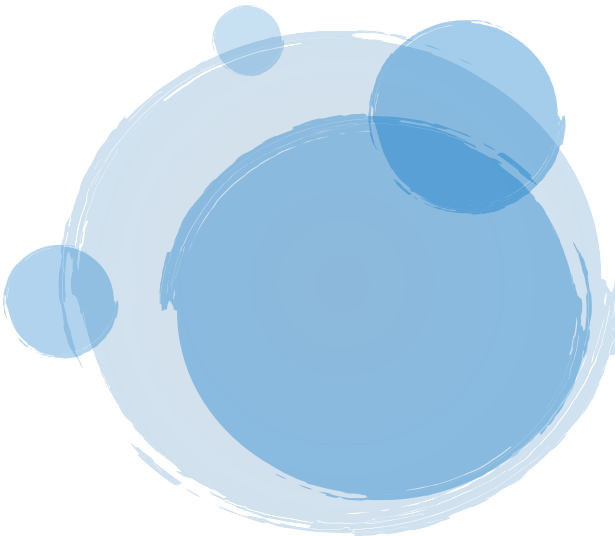
BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BERISI TENTANG TUJUAN DAN SASARAN YANG
DISELARASKAN DENGAN RPD PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2023-2026



Kantor Gubernur
Gorontalo
Kel Botu



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penerapan kebijakan pembangunan, perencanaan pembangunan menengah Provinsi Gorontalo disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 dengan visi sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yaitu;

“Gorontalo Maju dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan system hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo **Mandiri**, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan Tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007-2025 tersebut, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, adalah mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa.
 2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan, dan pemerataan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, social budaya, adat olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.
 3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebaran informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada public.
- RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Visi; “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebut, maka dikelompokkan penjabarannya melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA 2025

Tujuan Merupakan Penjabaran Implementasi Dari Pernyataan Misi. Tujuan Adalah Pernyataan Pernyataan Tentang Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Untuk Mencapai Misi Dengan Menjawab Isu Strategis Daerah Dan Permasalahan Pembangunan Daerah. Sedangkan Sasaran Adalah Penjabaran Dari Tujuan, Merupakan Hasil Yang Diharapkan Dari Suatu Tujuan Yang Diformulasikan Secara Terukur, Spesifik, Mudah Dicapai, Rasional, Untuk Dapat Dilaksanakan Dalam Jangka Waktu 4 Tahun Kedepan.

Berdasarkan Visi,Misi Dan Tujuan Yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya Menetapkan, Tujuan, Dan Sasaran Sebagai Berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Pemajuan Nilai Keagamaan Sebagai Bagian Pembangunan Daerah;

Untuk Mencapai Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang telah Ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Mempunyai Beberapa Sasaran Yang Akan Dilaksanakan Yaitu :

1. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Tata Laksana Fasilitas Kesra Pelayanan Dasar Dan Non Pelayanan Dasar;
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Penataan Produk Hukum Daerah Dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Tata Laksana Pengendalian Ekonomi Dan Pembangunan ;
5. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang Dan Jasa;
6. Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi Melalui Fasilitas Dan Pendampingan Terhadap Perangkat Daerah;
7. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Pimpinan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Sedangkan untuk mencapai Tujuan Peningkatan Pemajuan Nilai Keagamaan Sebagai Bagian Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Mempunyai Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Bina Mental Spiritual.

c. Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tersebut di atas dapat dicapai melalui indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dan Renstra PD. Adapun untuk indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



T.C-25
TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				PELAKSANA
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Indeks Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPBE	1 Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP OPD	70.01	71.51	73.01	74.51	Seluruh Biro
				IKM Sekretariat Daerah	86.44	87	88	89	Seluruh Biro
				Tingkat Implementasi penyederhanaan birokrasi	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi
				Indeks kualitas kebijakan publik	50%	50%	50%	50%	Biro Hukum
			2 Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Biro Organisasi
				Indeks Tata Kelola Pengadaan	68.5	69	69.5	70	Biro PBJ
				Indeks Pelayanan Publik	4.44	4.5	4.6	4.7	Biro Organisasi
				Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik,	72.65	78	79	80	Biro Organisasi

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



					Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Perda	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
					Indeks Reformasi Hukum	80%	80%	80%	80%	Biro Hukum
					Persentase rekomendasi bidang ekonomi dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	Biro Ekbang
2	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1	Terwujudnya pembinaan mental spiritual lembaga keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	100%	Biro Pem dan Kesra

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



SESUDAH PERUBAHAN

T.C-25

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAN SASARAN PROGRAM DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS SETDA		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				PELAKSANA
							2023	2024	2025	2026	
1	2	3	3			4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Indeks Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPBE	1	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Terwujudnya Penataan Organisasi	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	100%	100%	BIRO ORGANISASI
						Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik	78.50%	78.50%	78.50%	78.50%	
						Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB)	70%	75.01%	80.01%	80.01%	
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Presentase PD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan	Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi strategis	100%	100%	100%	100%	BIRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Kebijakan administrasi pembangunan	Persentase monitoring dan evaluasi kegiatan strategis	13 Dok	3 Dok	100%	100%	
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	BIRO HUKUM
						Presentase Pendampingan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	
					Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	9/9 Level Proaktif	1/9 Level Strategis	3/9 Level Strategis	5/9 Level Strategis	BIRO PENGADAAN
Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Tatalaksana Pelayanan Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum dan Pimpinan	100%	100%	100%	100%	BIRO UMUM					
2	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	2	Terwujudnya pembinaan mental spiritual lembaga keagamaan	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Rakyat	Persentase Lembaga Bina Mental Spiritual yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	BIRO PEMKESRA
\			3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan lingkup Biro	IKM BIRO		80	80	80	SELURUH BIRO
						LKIP BIRO		1 LAP	1 LAP	1 LAP	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 oleh **Biro-Biro** di Lingkungan Setda Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Program Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
 - c. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.
2. Program pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
 - c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Biro Hukum

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



c. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

1. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
 - b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam; dan
 - c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Biro Organisasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penataan Organisasi, dengan kegiatan:
- a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
 - b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

f. Biro Umum

1. Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Fasilitasi Keprotokolan;
- a. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - b. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





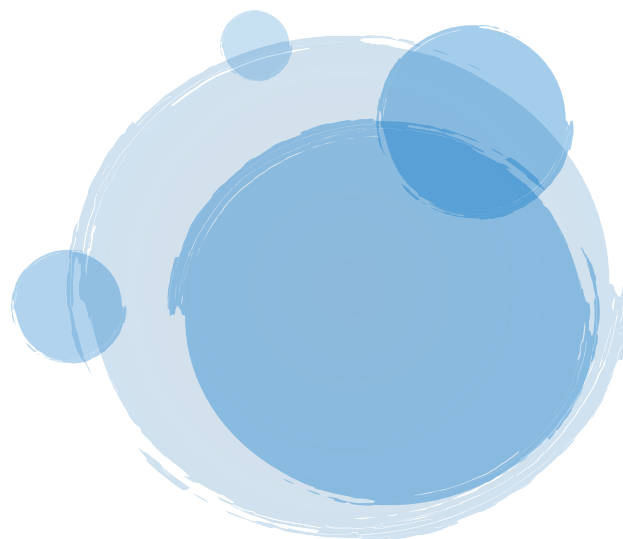
BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BERISI TENTANG KERANGKA PENDANAAN
KEGIATAN YANG AKAN DI LAKSANAKAN



Kantor Gubernur
Gorontalo
Kel Botu



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 Menjabarkan Rencana Program Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah Yang Akan Didanai Pada Tahun 2025. Komposisi Pendanaan Dari Program Dan Kegiatan Merupakan Elaborasi Lebih Lanjut Dari Focus Pembangunan Yang Tergambar Pada Tena Beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2025.

Program Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah Disajikan Bersama Dengan Semua Parameter Yang Menyertai, Yaitu Indicator, Target Tahun Rencan, Lokasi Serta Pagu Yang Merupakan Hasil Perumusan Bersama Oleh Seluruh Pemangku Kepentingan Untuk Kemudian Menjadi Acuan Alam Melaksanakan Pembangunan Daerah Di Masing-Masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Pendanaan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 Untuk Masing-Masing Perangkat Daerah Dapat Dicermati Pada Table Berikut :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	-			1 Laporan	544.550.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian	-	599.005.000,00	UPTD BALAI PERBIBITAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	544.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		599.005.000,00	UPTD BALAI PERBIBITAN TERNAK
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>umlah kelahiran ternak</i>	-			11860 Ekor	2.595.735.000,00						-	2.635.308.500,00	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Pengendalian, Pengawasan dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak</i>	-			2 Laporan	2.595.735.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah	Peternak	-	2.635.308.500,00	UPTD BALAI PERBIBITAN TERNAK
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>				2 laporan	2.595.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ekonomi Daerah	Peternak		2.635.308.500,00	UPTD BALAI PERBIBITAN TERNAK
		BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						25.622.795.777,00							53.541.288.266,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						25.622.795.777,00							53.541.288.266,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						25.622.795.777,00							53.541.288.266,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>LKIP Biro IKM Biro</i>	-			1 Laporan undefined undefined	6.268.009.345,00						-	9.389.302.656,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			6 Dok	221.510.037,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	313.742.043,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Catatan: 4.01.01.1.01.0001 Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	221.510.037,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		313.742.043,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 %	4.747.180.777,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	7.510.049.515,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/ Bulan	4.747.180.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		7.510.049.515,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			15 Orang	167.932.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	234.288.210,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	167.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		234.288.210,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			100 %	667.430.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	678.465.600,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Catatan:																

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	667.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		678.465.600,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	463.956.531,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	652.757.288,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	463.956.531,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		652.757.288,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Presentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD tepat waktu	-			100 %	1.962.960.232,00						-	5.898.302.093,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tugas Pemerintahan	-			9 Dok	708.645.700,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	1.431.544.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	102.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		484.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				6 Dokumen	237.409.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		524.044.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				2 Dokumen	368.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		423.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	-			7 Dok	752.714.532,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	2.107.258.093,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				6 Dokumen	415.302.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		897.258.093,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	41.809.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		242.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				1 Laporan	295.603.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		968.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah</i>	-			20 Kerja Sama	501.600.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	2.359.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			<i>Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi</i>				5 Dokumen	152.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		907.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			<i>Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi</i>				3 Dokumen	103.723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		726.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			<i>Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi</i>				5 Laporan	245.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		726.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Presentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	-			100 %	17.391.826.200,00						-	38.253.683.517,00	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	<i>Jumlah Lembaga Bina Mental Spritual</i>	-			1 Unit 300 Lembaga	13.601.421.686,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	26.905.870.247,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola</i>				1 Unit	878.205.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.058.373.127,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>				300 Lembaga	12.723.215.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		25.847.497.120,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas Kesra Pelayanan Dasar</i>	-			800 Dok	3.690.404.514,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	11.140.457.189,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>				800 Dokumen	3.690.404.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		11.140.457.189,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i>	-			1 Dok	100.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	207.356.081,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Catatan:																

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		207.356.081,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BIRO HUKUM						8.806.257.278,00							8.806.257.278,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.806.257.278,00							8.806.257.278,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.806.257.278,00							8.806.257.278,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IKM Biro LAKIP Biro	-			801 laporan	5.689.536.478,00						-	5.724.665.328,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dok	422.030.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	425.144.900,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	155.796.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		158.873.300,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	128.077.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		128.078.600,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	138.157.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		138.193.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Lap	3.540.637.398,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	3.543.147.328,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	3.443.182.398,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		3.444.912.628,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	97.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		98.234.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Pengadaan pakaian dinas	-			46 orang	175.789.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	178.603.600,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	25.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		25.730.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	150.039.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		152.873.600,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi undefined	-			1 Paket 1 Lap	562.532.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	588.348.900,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		23.678.900,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	538.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		564.670.000,00	BIRO HUKUM

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di adakan	-			4 Unit	707.091.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	731.100.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	635.823.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		659.100.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	71.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		72.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			2 Laporan	137.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	112.080.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	137.080.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		112.080.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	-			2 Unit	144.376.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	146.240.600,00	BIRO HUKUM
Catatan:																

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	115.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		116.288.500,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	29.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		29.952.100,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi	-			100 Persen	3.116.720.800,00						-	3.081.591.950,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perundang Undangan	-			100 Persen	1.556.654.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	1.543.337.250,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				60 Dokumen	413.595.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		413.596.300,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				300 Dokumen	118.466.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		118.466.450,00	BIRO HUKUM
Catatan:																

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya</i>				360 Dokumen	301.578.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		301.579.300,00	BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i>				60 Dokumen	723.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		709.695.200,00	BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Jumlah Fasilitas Bantuan Hukum</i>	-			100 Persen	1.560.066.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Miskin	-	1.538.254.700,00	BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum															
			<i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</i>				6 Kasus	910.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Miskin		888.076.600,00	BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM															
			<i>Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan</i>				6 Kasus	650.046.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Miskin		650.178.100,00	BIRO HUKUM	
		BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN							7.246.668.513,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						7.246.668.513,00							0,00		
atatan:	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						7.246.668.513,00							0,00		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IKM Biro LAKIP Biro	-			80 1 Laporan	4.394.715.645,00						-	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	217.641.748,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	209.241.748,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD	-			100 %	3.086.558.897,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh ASN Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Catatan:	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/ Bulan	3.078.158.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Sumber Daya Manusia	Seluruh ASN Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Sumber Daya Manusia	Seluruh ASN Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			1 Paket	63.046.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	45.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			1 Paket	385.351.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	320.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			6 Unit	116.491.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
atatan:	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	39.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	76.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa yang Disediakan	-			2 Laporan	396.051.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	83.211.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	312.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			25 Unit	129.576.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	105.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	13.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Strategis</i>	-			100 %	2.179.042.550,00						-	0,00	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro</i>	-			8 Dokumend	1.474.990.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>				4 Dokumen	724.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>				4 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	-			4 Dok	90.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>				4 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD	-			8 Dokumen	614.052.550,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkata n Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkata n Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD</i>				4 Dokumen	414.052.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkata n Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<i>Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis</i>	-			100 %	672.910.318,00						-	0,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD,APBN dan Wilayah</i>	-			12 Lap	659.230.318,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>				4 Laporan	373.480.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i>				4 Laporan	197.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Catatan:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>				4 Laporan	88.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Infrastruk tur Dasar dan Strategis	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>	-			1 Dok	13.680.000,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Ekonomi Daerah	-	-	0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	13.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Ekonomi Daerah	-		0,00	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						8.813.849.259,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.813.849.259,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.813.849.259,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	7.565.412.159,00						-	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			8 Dokumen	168.181.500,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	168.181.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			100 %	6.390.844.564,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				37 Orang/ Bulan	6.390.844.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.522.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	22.522.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	-			1 Paket	275.858.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Catatan:	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Catatan: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	275.858.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	-			1 Laporan	708.006.095,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	708.006.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<i>Tingkat kematangan UKPBJ</i>	-			1/9 Level Strategis	1.248.437.100,00						-	0,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Presentase Penyelenggaraan PBJ</i>	-			100 %	761.815.100,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	133.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	408.623.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	219.827.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase Layanan SPSE dan Pengembangan Sistem Informasi	-			100 %	187.159.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	63.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	85.398.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	38.659.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pendampingan, Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ	-			100 %	299.463.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo	-	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:l2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				35 Orang	121.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	118.969.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	58.802.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BIRO ORGANISASI						6.299.911.110,00							7.490.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.299.911.110,00							7.490.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						6.299.911.110,00							7.490.000.000,00	
1. Catatan:	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	IKM BIRO LAKIP BIRO	-			80 % 1 Laporan	5.274.508.810,00						-	6.040.000.000,00	

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	-			5 dok, 8 lap Dok/lap	218.757.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo	-	250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	218.757.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan	-			32 orang, 12 lap orang/lap	3.706.467.525,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo	-	4.090.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/ Bulan	3.625.481.025,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		4.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	80.986.500,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		90.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-			12 orang	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo	-	350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
Catatan:																

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				12 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-			3 Paket 12 Lap	702.372.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo	-	700.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	702.372.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		700.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-			6 Laporan	646.912.085,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo	-	650.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	646.912.085,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		650.000.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	<i>Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB) Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik</i>	-			100 % 75,01 % 78,50 %	1.025.402.300,00						-	1.450.000.000,00	

Catatan:



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD Kab/kota yang dievaluasi kelembaganya Jumlah PD yang di tata kelembagaannya Persentase PD yang telah menyusun Anjab yang sesuai dengan struktur Organisasi yang berlaku	-			6 Kab/kota 29 OPD 100 %	388.871.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota	-	650.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	180.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				8 Dokumen	208.066.500,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	JJumlah PD dan Kab/Kota dengan Predikat AKIP Baik Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Sesuai Ketentuan Jumlah PD dan Kab/Kota yang menerapkan RB dengan kategori baik Jumlah PD yang menerapkan aspek Pelayanan Publik Jumlah PD yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintah	-			29 PD 6 Kab/kota 29 PD 6 Kab/kota 29 PD 6 Kab/kota 29 PD 6 Kab/kota 29 PD 6 Kab/kota 29 PD 6 Kab/kota	636.530.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota	-	800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				33 Dokumen	172.153.500,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		180.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				34 Dokumen	185.729.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		100.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				3 Dokumen	108.669.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				7 Dokumen	169.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		170.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO UMUM						50.976.099.502,00							73.645.594.791,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						50.976.099.502,00							73.645.594.791,00	
catatan:	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						50.976.099.502,00							73.645.594.791,00	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	LAKIP Biro IKM Biro	-			1 Laporan 80	50.976.099.502,00						-	73.645.594.791,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Lap 8 Dok	176.541.700,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	161.677.767,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	126.141.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		139.571.704,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	50.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		22.106.063,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	10.632.442.643,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	10.842.513.031,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan	10.516.760.643,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		10.701.031.235,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	115.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		141.481.796,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	-			1 Lap	159.982.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	207.133.271,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	159.982.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		207.133.271,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	-			20 orang	279.674.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	223.300.379,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	279.674.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		223.300.379,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-			22 Paket	3.524.565.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	2.815.311.598,00	BIRO UMUM
Catatan:																

Catatan:



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	3.524.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		2.815.311.598,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Lap	4.385.479.960,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	4.429.679.960,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.385.479.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		4.429.679.960,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			30 Unit	5.091.770.394,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	5.157.782.758,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	1.224.258.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		1.178.856.749,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	3.867.511.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		3.978.926.009,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang dan Paket Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			1 Paket 6 Orang	2.066.876.510,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	2.067.876.510,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	323.676.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		323.676.510,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	393.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		394.200.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		1.250.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekertariat Daerah yang disediakan	-			36 Paket	23.423.903.825,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	46.173.178.688,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	7.691.747.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		8.325.980.616,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	6.405.507.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		7.499.477.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	9.326.648.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		30.347.720.572,00	BIRO UMUM

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	-			3 Lap	1.234.862.090,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	-	1.567.140.829,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	436.031.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		564.967.499,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	494.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		614.514.572,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	304.162.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		387.658.758,00	BIRO UMUM
		BADAN PENGHUBUNG						8.379.147.605,00							8.828.554.984,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.379.147.605,00							8.828.554.984,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						8.379.147.605,00							8.828.554.984,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	7.051.501.473,00						-	7.404.751.148,00	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	5.459.887.451,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	5.418.256.438,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/Bulan	3.239.014.227,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		3.400.964.938,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	2.195.923.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.991.094.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	24.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		26.197.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.042.814.022,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-	-	1.182.404.710,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





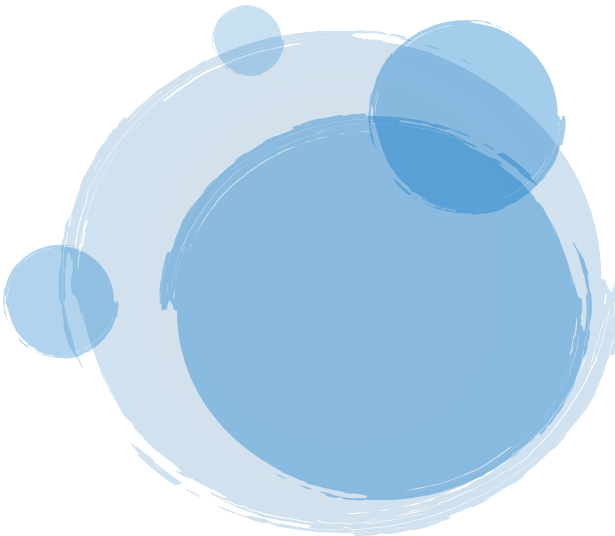
BAB V

PENUTUP

BERISI TENTANG KESIMPULAN DAN ARAHAN



Kantor Gubernur
Gorontalo
Kel Botu



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang mengemban amanat rencana kerja tahun terakhir dari lima tahun perencanaan Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang berlaku sedari Tanggal 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja ini merupakan hasil pemetaan Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disempurnakan Kepmen 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, ditetapkan prinsip dan kaidah yang harus menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. **Prinsip dan Kaidah dimaksud adalah:**

1. Seluruh Biro, Bagian dan Sub Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan Program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sekretariat Daerah Tahun 2025 secara sinergis, sinkron dan terintegrasi.
2. Renja - PD Sekretariat Daerah Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2025.
3. Adapun besaran anggaran yang terdapat dalam Renja - PD Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini masih bersifat indikatif dan masih dapat berubah kedepannya mengingat masih terdapat beberapa tahapan strategis dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Adapun untuk **Rencana Tindak Lanjut** dalam hal penyempurnaan Renja-PD dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila dalam proses penganggaran terdapat alokasi anggaran tambahan untuk Sekretariat Daerah, maka tambahan anggaran tersebut akan diprioritaskan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Renja – PD Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini.
2. Dalam hal pelaksanaan Renja - PD Sekretariat Daerah Tahun 2025 kedepannya, terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi pada tahun pelaksanaan dan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang ada maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan Renja – PD Sekretariat Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja (Renja) 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo ini disusun dengan harapan beroleh hasil yang maksimal untuk pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada khususnya serta pencapaian visi pembangunan Provinsi Gorontalo yakni terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Daerah



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

